



POTRET PERKEMBANGAN BELANJA ANGGARAN COVID-19 DI PROVINSI RIAU

DISUSUN OLEH :

TAUFIK (PENELITI FITRA RIAU)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Riau dalam mengatasi dampak covid 19 sudah melakukan segala upaya dari penerbitan surat edaran larangan berkerumun dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan diikuti oleh keputusan walikota dan Bupati pada Daerah yang terdampak tinggi dalam persebaran kasus Covid-19 dengan penerapan Pembatasan Berskala Mikro (PSBM). Upaya tersebut tidak berhenti pada penguatan kebijakan regulasi yang bersifat preventif saja tetapi pemerintah Provinsi Riau sudah melakukan realokasi dan refocussing anggaran sebagai bentuk dorongan penguatan dari sisi kebijakan belanja anggaran untuk penanganan Covid-19. tercatat dalam perkembangan alokasi belanja Pemprov Riau telah melakukan 3 kali pergeseran belanja sehingga total anggaran belanja penanganan Covid 19 di Provinsi Riau sebesar Rp. 433 M.

Krisis wabah ini dengan segala kebijakan dukungan anggaran yang dialokasikan oleh Pemda dari perkembangan, tercatat juga bahwa banyak mengalami pasang surut yang terus terdapat problem dan masalah mulai dari distribusi pemulihan ekonomi seperti bantuan langsung tunai, bansos yang tidak tepat sasaran, Informasi pengadaan barang dan jasa, Belanja anggaran, Realisasi Belanja dan Pendataan dalam penanganan Covid yang masih terkontaminasi tidak terbuka dan sulit di akses public dan minimnya kesadaran

masyarakat untuk mengakses dokumen public terkait dengan informasi belanja anggaran Covid-19.

Selain Itu, tidak adanya Metode yang lebih Konperensif terhadap perencanaan strategi yang matang baik dalam pola pemanfaatan belanja anggaran maupun pada pendistribusian belanja serta akuntabilitas dan transparansi kebijakan sehingga berdampak bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah dalam penanganan wabah Covid-19 kurang kolektif dan cenderung menimbulkan kontroversi berbagai masalah kebijakan dilapangan. Apalagi bahwa berdasarkan catatan Pemerintah lebih cenderung memfokuskan belanja anggaran untuk pemulihan ekonomi dari pada belanja bidang kesehatan

Dengan demikian maka, Untuk melihat bagaimana perkembangan impelementasi kebijakan baik pada sisi pelaksanaan belanja anggaran untuk penanganan Covid-19 maupun pada akuntabilitas dan transparansi serta mengidentifikasi masalah-masalah. Maka melalui studi analisis ini Fitra Provinsi Riau, FITRA NTB bersama Seknas Fitra mencoba melakukan pemantauan potret kebijakan anggaran belanja dengan ruang lingkup studi Nasional dan Daerah dengan objek lokasi pemantauan Provinsi Riau dan provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Rumusan Masalah

Analisis kajian ini adalah melihat sejauh mana progress Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya penanganan Covid-19, Berdasarkan dari:

1. Bagaimanakah komitmen Pemerintahan Daerah dalam pengalokasian belanja anggaran, realisasi penggunaan anggaran baik pada APBD 2020 Penyesuaian.
2. Melihat penguatan anggaran pada APBD 2021 dengan komposisi belanja program dan kegiatan penanganan Covid-19.
3. Menginterpretasikan bagaimana dampak penggunaan belanja anggaran bagi masyarakat terdampak serta menggali akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kebijakan penanganan covid-19

3. Tujuan Analisis

Studi analisis perkembangan implementasi anggaran Covid-19 di Provinsi Riau memiliki tujuan yaitu:

- Mengidentifikasi bagaimana trend perkembangan belanja anggaran penanganan Covid-19 di Provinsi Riau terhitung paska penyesuaian APBD 2020 dan penguatan Kebijakan Anggaran 2021 dalam komposisi belanja kegiatan dan program.
- Mereview dampak penanganan Covid-19 dalam realisasi belanja anggaran, dan perencanaan kebijakan dalam komposisi APBD 2020
- Memberikan catatan sebagai kertas posisi kepada Pemerintah Daerah untuk upaya perbaikan perencanaan kebijakan dan pengelolaan pada penanganan kebijakan Covid-19.

4. Manfaat Analisis

Manfaat dari Studi Perkembangan Implementasi Anggaran Covid-19 di Provinsi Riau adalah

1. Studi analisis ini sebagai bahan rujukan informasi public untuk melihat bagaimana perkembangan Belanja Anggaran Penanganan Covid-19 yang terjadi di Provinsi Riau
2. Studi analisis ini sebagai catatan atas temuan-temuan lapangan dalam berbagai persoalan penanganan Covid-19 yang diukur berdasarkan realisasi belanja anggaran dan dampak penanganan Covid-19 di Provinsi Riau
3. Hasil studi analisis ini diharapkan mampu memberikan masukan di sektor perencanaan kebijakan anggaran dan upaya dorongan keterbukaan informasi public kepada pemerintah daerah dalam catatan potret perkembangan penanganan Covid-19 di Riau

BAGIAN II

KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN ANGGARAN PENANGANAN COVID-19

B. KONDISI FISKAL DAERAH MASA PANDEMI

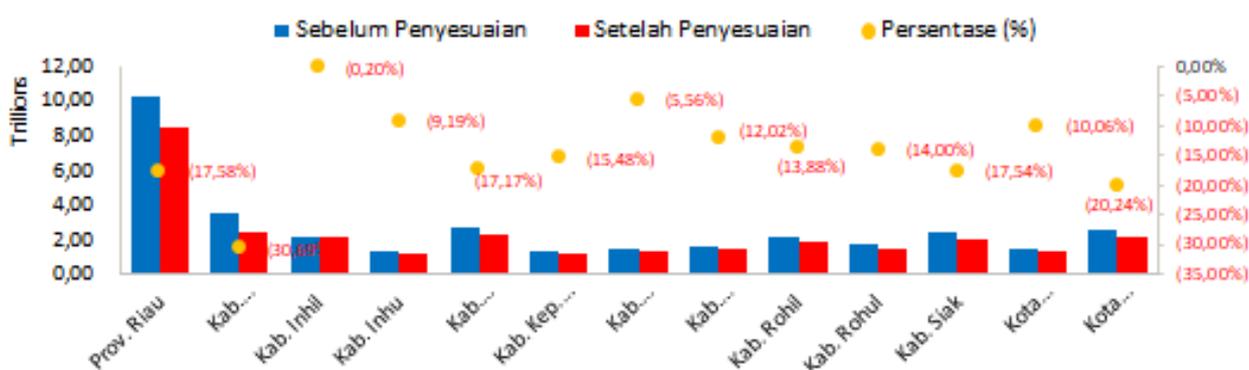
1. Penyesuaian Target Pendapatan Daerah Tahun 2020

Kondisi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia telah berdampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini mengharuskan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah cepat dalam penanganan Covid-19. Berdasarkan Intruksi Presiden, Pemerintah Daerah harus melakukan rasionalisasi kebijakan anggaran dan di fokuskan pada upaya penanganan Covid-19 terutama pada tiga sektor yaitu Penanganan Kesehatan, Jaring Pengaman Sosial, dan Pemulihan Ekonomi.

Empat daerah yang tidak melakukan penyesuaian pendapatan yaitu Kab. Inhil, Kab. Kampar, Kab. Pelalawan, Kab. Rokan hilir, dan Kab. Rokan hulu. Sedangkan pada sumber pendapatan daerah dari transfer pusat, terjadi penurunan seluruh daerah di Riau, angka tertinggi

Penurunan belanja tranfer (TKDD) APBN 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Perpres 72 tahun 2020, proyeksi pendapatan transfer pusat ke daerah baik DBH, DAU, DAK, DID yang akan diterima Riau tahun 2020 Rp. 5,2 T,

Grafik 1: Penyesuaian Target Pendapatan Daerah se- Riau Tahun 2020



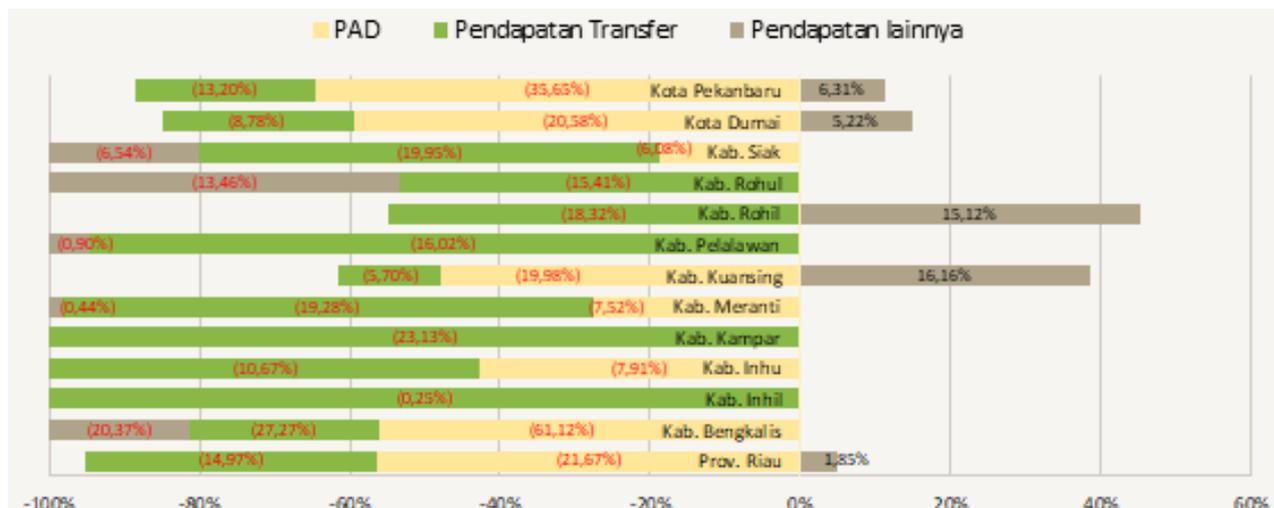
Sumber: APBD Riau, olahan FITRA

Penyesuaian pendapatan terutama yang bersumber dari PAD terjadi penurunan dengan rata-rata 22% dari delapan daerah, sedangkan daerah lain tidak melakukan penyesuaian proyeksi pendapatan, artinya target yang ditetapkan masih sama sebelum pandemi.

menurun 15% dari proyeksi yang ditetapkan dalam APBD Murni sebesar Rp. 6,2 T. Tidak hanya pendapatan dari perimbangan, dampak terganggunya aktivitas ekonomi di daerah ditengah pandemi ini, Pemerintah Daerah Riau juga harus menurunkan target pendapatan PAD tahun 2020 menjadi Rp. 31 T-

menurun 21,7% dari target yang ditetapkan pada APBD Murni.

Grafik 1; Penyesuaian Target Pendapatan Berdasarkan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Tahun 2020



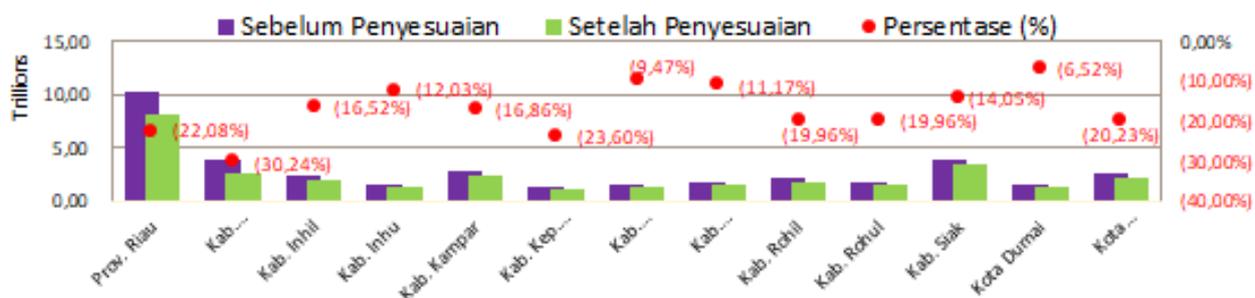
Sumber: APBD Riau, Olahan FITRA

2. Rasionalisasi Belanja Daerah Tahun 2020

Dampak covid-19 mengharuskan daerah melakukan rasionalisasi belanja, penurunan belanja daerah se-riau tahun 2020 rata-rata sebesar 17 persen, Provinsi Riau mencapai 22 persen dan telah dilakukan rasionalisasi bel-

nja. Jika di potret daerah kab/kota yang turun rasionalisasinya adalah kota dumai hanya 6.52% dari pendapatan sebelum penyesuaian Rp 1.434 Milyar dan setelah penyesuaian menjadi Rp 1.340 Milyar.

Grafik 3; Rasionalisasi Belanja Daerah se- Riau Akibat Covid-19

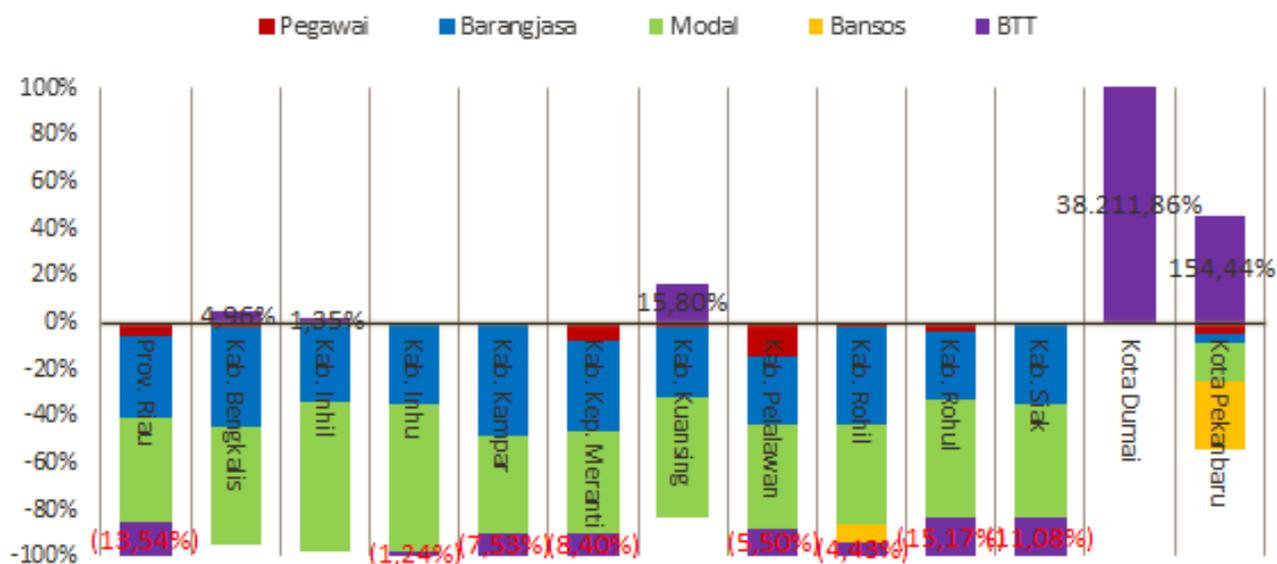


Sumber: APBD - olahan FITRA Riau

Selain itu potret Rasionalisasi belanja cukup besar terjadi penurunan pada belanja modal dengan rata-rata 42%, barang jasa 29%, belanja pegawai 4%, belanja tidak terduga, belanja bansos 7%.

Sedangkan untuk belanja tidak terduga/BTT terjadi peningkatan cukup signifikan, terdapat di empat daerah yaitu Kota Dumai, Kota Pekanbaru, kab. Kuantan Singingi dan Kab. Bengkalis.

Grafik 4; Potret Belanja Perubahan Pasca Pandemi.



Sumber: APBD, Data Olahan FITRA Riau.

BAGIAN III

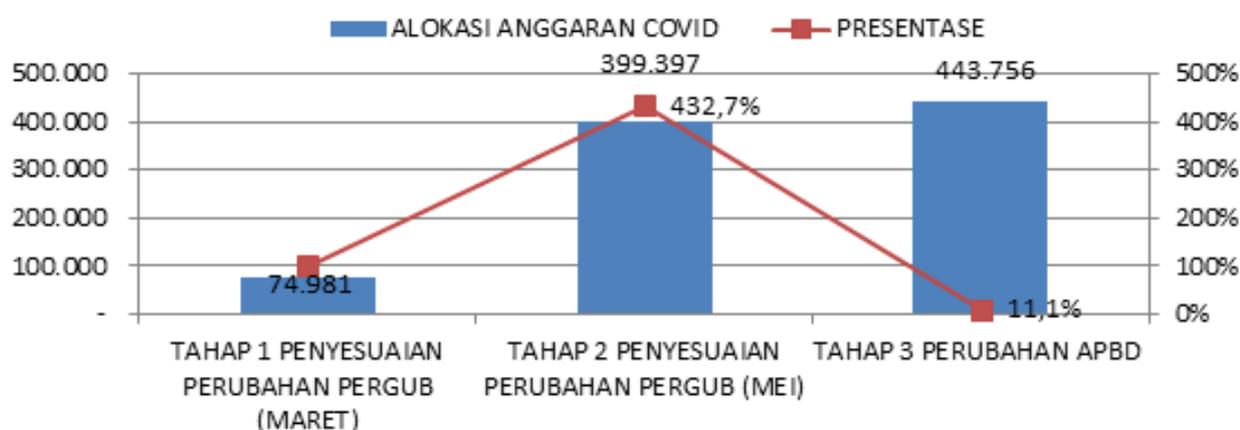
KEBIJAKAN ANGGARAN PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI RIAU

1. Realokasi Anggaran dan Refocussing Anggaran Tahun 2020 di Provinsi Riau

Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam penanganan wabah Covid-19 terlihat pada intruksi presiden yang mengharuskan daerah untuk melakukan realokasi dan refocussing anggaran. Berdasarkan Perkembangan, Pemerintah Provinsi Riau, sudah melakukan tiga kali tahapan pergeseran pada belanja anggaran APBD 2020 dengan tahap pertama penyesuaian belanja di bulan Maret sebesar Rp 74.98 Milyar yang di realokasikan untuk lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu

diperuntukan untuk belanja Bantuan Keuangan (Bankeu) Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan (Bankeu) Kelurahan Sebesar Rp 26.8 Milyar. Serta BTT sebesar Rp. 372.596 Milyar. Sedangkan pergeseran pada tahap tiga adalah perubahan APBD 2020, Pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan belanja anggaran untuk penanganan Covid-19 menjadi Rp. 443.756 Milyar. Selain itu, berdasarkan potret belanja Anggaran untuk penanganan Covid-19 dari -

Grafik 5; Pergeseran anggaran penanganan Covid 19 Provinsi Riau



Sumber: Dok APBD olahan FITRA

Dinas Kesehatan Sebesar Rp. 46.73 Milyar Rumah Sakit Jiwa Tampan Sebesar Rp 2.325 Milyar, Rumah Sakit Arifin Ahmad Sebesar Rp 21.05 Milyar dan Rumah Sakit Petala Bumi Sebesar Rp 4.872 Milyar.

Pergeseran tahapan kedua penyesuaian dibulan Mei, Sebesar Rp. 399.396 Milyar yang

perkembangan dalam tiga kali tahapan penyesuaian APBD 2020 sampai kepada perubahan APBD 2020. Jika dipersentasekan hanya 11,1% mengalami kenaikan sedikit dari pergeseran belanja anggaran pada tahapan pertama sampai kepada perencanaan APBD perubahan 2020.

Hal tersebut disebabkan karena keluarnya Mandate SK Bersama Mendagri dan Menteri Keuangan No.119/2813/SJ dan No 117/KMK.07.2020 yang mana mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk merasionalisasikan anggaran belanja dari sektor pengadaan barang dan jasa dan belanja modal masing-masing 50% sehingga Pemerin-

tah Provinsi Riau dalam kebijakan belanja anggaran mengharuskan untuk melakukan penyesuaian 50% tersebut dengan melakukan pergeseran kembali belanja anggaran. berikut rincian objek belanja yang sudah di rasionalisikan oleh Pemerintah Provinsi Riau 50% diantara rinciannya sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal
Perjalanan Dinas dan Luar Dinas	Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Barang (Bahan/Material) habis pakai untuk keperluan kantor	Pengadaan mesin dan alat berat
Pakaian dinas dan atributnya, serta pakaian khusus dan hari tertentu	Pengadaan tanah
Pemeliharaan	Renovasi ruangan /gedung mebeleur, dan perlengkapan perkantoran
Perawatan kendaraan bermotor	Pembangunan gedung baru
Sewa rumah/gedung/gudang dan parker	Dan pembangunan infrastruktur lainnya yang masih ditunda ditahun berikutnya
Sewa sarana mobil dan Sewa alat berat	
Jasa kantor dan sewa antara lain untuk langganan daya listrik, air telekomunikasi dan peralatan	
Jasa konsultan Tenaga ahli, instruktur dan narasumber	
Makan dan minum serta paket rapat dikantor di kantor dan diluar kantor	
Sosialisasi workshop dan kegiatan diskusi	

Sumber: rincian objek belanja Pemrov Riau, BPKAD diolah FITRA Riau.

Perkembangan belanja anggaran covid-19 Pada APBD P. Dilihat dari, perkembangan anggaran belanja penanganan Covid-19 di Provinsi pergeseran penyesuaian APBD dan perubahan APBDP 2020, Faktanya dari pergeseran pertama, kedua sampai ketiga pada APBD perubahan Pemerintah Provinsi Riau melakukan perubahan belanja pada APBD perubahan 2020 untuk belanja bidang Kesehatan sebesar Rp. 76.27 Milyar sedangkan

untuk alokasi anggaran belanja yang lainnya seperti sektor Pengamanan Jaringan Sosial, dampak ekonomi tidak lagi dianggarkan pada belanja APBDP sudah dianggarkan pada APBD Penyesuaian 2020 dan anggaran belanja yang sudah digeser tersebut di cantumkan pertanggung-jawaban pada APBD Perubahan 2020 sebagai lampiran bahwa kegiatan belanja sudah atau sedang proses dilaksanakan.

Tabel 1 peruntukan sasaran belanja pada Alokasi APBD Perubahan Senilai Rp 76 Miliar

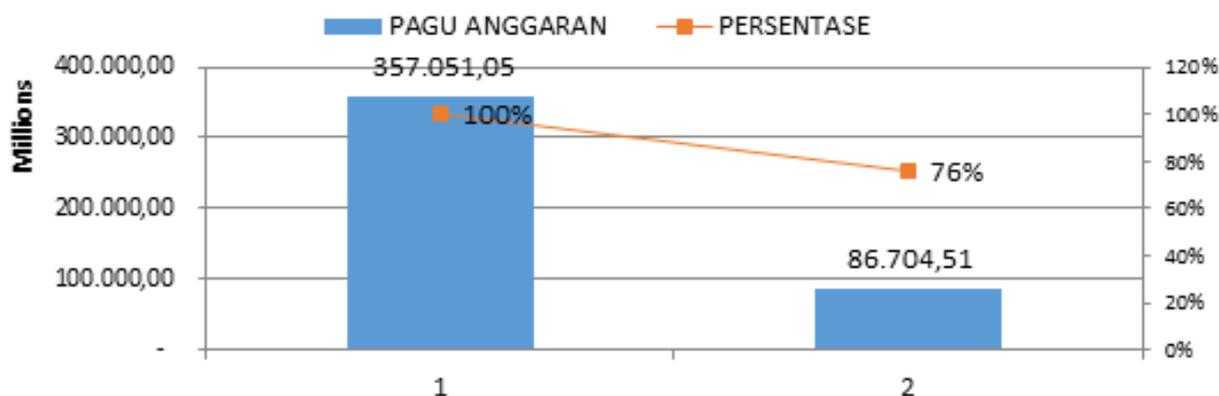
Belanja Bidang Kesehatan	APBD Perubahan
Penyediaan biaya pelayanan kesehatan COVID-19	Rp. 5.600.000.000,00
Penanggulang krisis kesehatan COVID-19	Rp. 41.132.381.383,00
Insentif Tenaga Kesehatan Tahap 3	Rp. 4.110.000.000,00
Penanganan Covid-19 RSUD Arifin Ahmad	Rp. 21.050.896.000,00
Penanganan Covid (RS. Petala Bumi)	Rp. 4.378.745.000,00

Sumber: Dok APBD P 2020, Olahan FITRA Riau

Sasaran Belanja Covid 19 Pada APBD Penyesuaian dan Perubahan. update Informasi data realisasi SP2D per 30 Desember 2020. Provinsi Riau, untuk alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.357.051 Milyar yang diprioritaskan untuk Bansos, Hibah, Bankeu dan Belanja Tidak Terduga. Sedangkan untuk belanja langsung Pemprov mengalokasikan belanja tersebut untuk diprioritaskan pada penanganan Covid-19 di empat rumah sakit daerah dan penyediaan biaya pelayanan serta penanggulangan krisis kesehatan Covid-19 pada dinas kesehatan, dengan total belanja langsung tersebut sebesar Rp 86.704, Miliar.

Berdasarkan trend pagu anggaran untuk penanganan Covid-19 di Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau lebih cenderung mengalokasikan anggaran belanja untuk penanganan Covid-19 kepada belanja Pemulihan Ekonomi dan Jaringan Pengaman Sosial dari pada untuk belanja kesehatan sehingga belanja kesehatan lebih cenderung sedikit. Jika dipersentasikan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung hanya 76% jauh lebih tinggi belanja yang diprioritaskan untuk Bansos, Hibah, Bankeu dan BTT pada post belanja tidak langsung sebesar Rp. 357.051 Milyar. Lihat Grafik di bawah ini belanja langsung pada poin (2) dan belanja tidak langsung pada poin (1).

Grafik 6. Sasaran Belanja Penanganan Covid-19 pada APBD Penyesuaian dan APBDP 2020

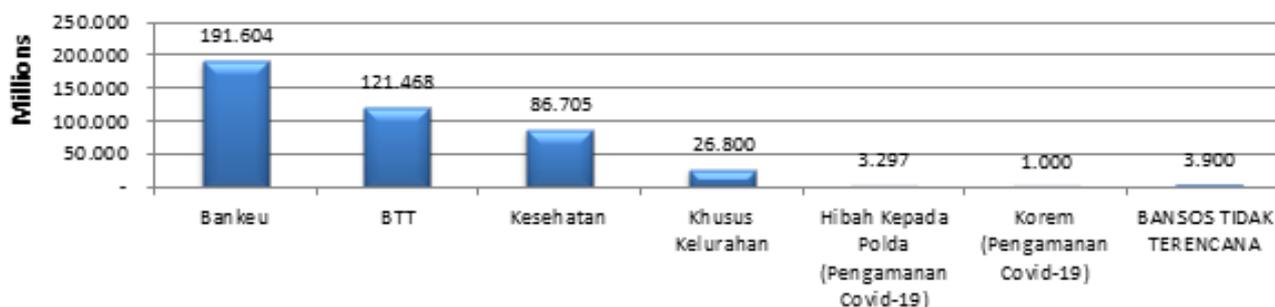


Sumber: Data BPKAD Riau, rekapitulasi SP2D PER 30 DESEMBER 2020,

Belanja Covid-19 Salah Sasaran dan Bukan Kewenangan. Selain itu, Potret dari Rincian belanja Covid-19 berdasarkan APBD 2020 Penyesuaian dan APBD P 2020. Terdapat belanja Hibah Pemerintah Provinsi Riau kepada Kepolisian Daerah (Polda Riau) sebesar 3.296 Milyar dan Korem sebesar Rp 1 Milyar. Hibah tersebut diberikan untuk menjaga pengamanan Covid-19. Jika ditelaah, dari fungsi tidak berkolerasi bagi penanganan wa-

bah Covid-19 apalagi untuk Pelayanan Kesehatan dan pemberian Hibah kepada dua Lembaga tersebut juga merupakan belanja yang mubazir yang mana daerah lagi mengalami kesulitan pembiayaan dalam menangani Covid-19 tetapi pemerintah daerah justru memberikan belanja hibah kepada dua lembaga tersebut yang mana pemberian hibah tersebut tidak tepat dan tidak sesuai fungsi kewenangan.

Grafik 7. Rincian Anggaran Penanganan Covid-19 pada (APBD Penyesuaian dan APBDP 2020)



Sumber: Data BPKAD Riau, rekapitulasi SP2D PER 30 DESEMBER 2020,

Dilihat dari Potret Kebutuhan Sebaiknya anggaran hibah pada dua lembaga tersebut seharusnya ditambahkan kepada belanja bidang kesehatan yang cenderung lebih sedikit kalau dilihat dari korelasi kebutuhannya jika anggaran hibah diperuntukan kepada belanja kesehatan maka korelasi jelas dalam implementasi penggunaan dan capaian dari target belanja.

saat ini terhitung belanja untuk pemberian layanan kesehatan hanya Rp 5.6 M, untuk

penambahan biaya penanganan kesehatan pada rumah sakit daerah yang hanya dianggarkan sebesar Rp. 4.378 Milyar pada Rumah Sakit Petala Bumi dan untuk Bansos tidak terduga juga nilainya sangat kecil sebesar Rp. 3.900 Milyar. Apabila anggaran hibah tersebut dialihkan kepada belanja penanganan kesehatan di dua Rumah Sakit tersebut ditambah untuk biaya belanja Bansos tidak terduga jika di bagi maka masing-masing mendapatkan Rp. 1.432 Miliar

Uraian Kegiatan	Anggaran	Simulasi	Anggaran yang telah di bagi menjadi (Simulasi)
Hibah Kepada Polda (Pengamanan COVID-19)	Rp. 3.296.760.000	Jika Anggaran Hibah Polda dan Korem dialihkan dan di bagi 3 maka untuk belanja penanganan Covid-19 di RSUD Arifin Ahmad dan RS Petala Bumi mendapatkan penambahan sebesar Rp. 1.432.253.333	Rp. 22.483.149.333
Korem (Pengamanan COVID-19)	Rp. 1.000.000.000		
Penanganan Covid-19 RSUD Arifin Ahmad	Rp. 21.050.896.000		
Penanganan Covid-19 RS Petala Bumi	Rp. 4.378.745.000		
Bansos Tidak Terduga	Rp. 3.900.000.000		
			Rp. 5.810.998.333
			Rp. 5.332.253.333

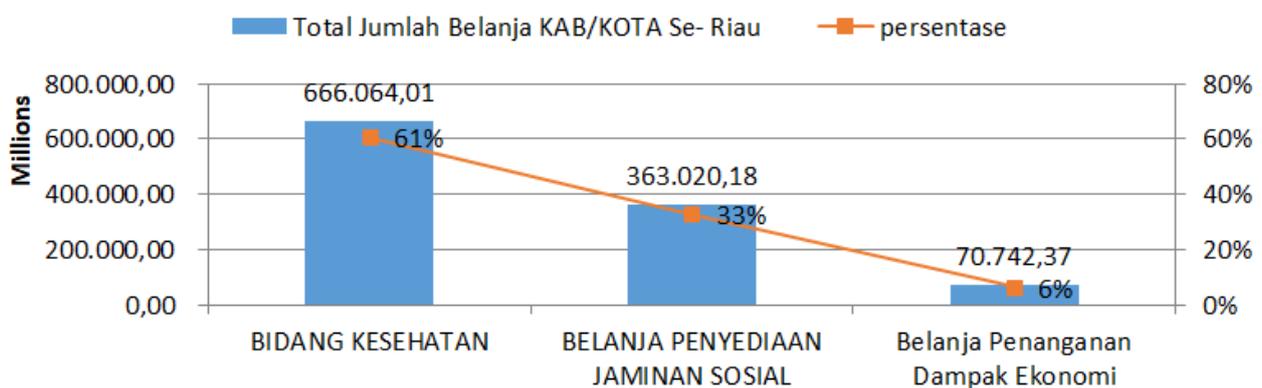
Sumber: Data APBD Riau, diolah dan disimulasikan oleh FITRA

2. Realokasi dan Refocussing Anggaran Tahun 2020 Kab/Kota Se-Riau

Selain Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kab/Kota juga melakukan realokasi dan refocussing anggaran pada belanja daerah dan melakukan pergeseran anggaran pada perubahan APBD 2020. jika di totalkan belanja anggaran untuk penanganan Covid-19 untuk Kab. Se Riau berjumlah Rp. 881.045 Milyar. Sedangkan untuk Kota Se-Riau sebesar Rp. 218.781 Milyar.

Penelusuran FITRA RIAU dari sumber DJPK bahwa Kab/Kota yang melakukan penyesuaian APBD untuk penanganan Covid-19 yang paling besar adalah Kab. Bengkalis sebesar Rp. 206 Milyar dengan Program Sosial Savety Net senilai Rp. 98.498 Milyar, belanja Bidang kesehatannya senilai Rp. 98.498 M dan Belanja untuk penanganan dampak ekonomi

Grafik 8. Sektor Alokasi Belanja Anggaran Penanganan Covid Kab/Kota Se-Riau, Berdasarkan APBD 2020 Penyesuaian

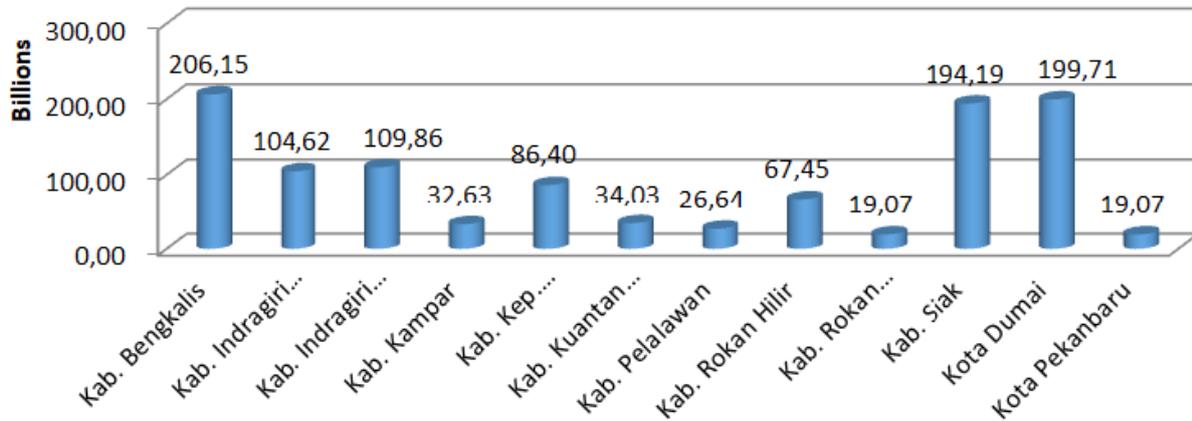


Sumber: Data APBD Penyesuaian, olahan FITRA Riau

Jika dilihat dari peruntukan Belanja anggarannya digunakan untuk tiga sektor belanja yaitu untuk penanganan dampak ekonomi sebesar Rp. 70.74 Milyar belanja bidang kesehatan sebesar Rp. 666.064 Milyar dan belanja anggaran untuk Sosial Savety Net (Jaringan Pengaman Sosial) sebesar Rp. 363.020 Milyar pada masing-masing belanja anggaran daerah se Riau.

Rp. 82.889 Milyar. Sedangkan daerah yang paling kecil adalah daerah Rokan Hulu dan Kota Pekanbaru masing-masing menganggarkan untuk penanganan covid-19 hanya berkisar Rp. 19.074 Milyar.

Grafik 9. Anggaran Penanganan Covid-19 di 12 Kab/Kota se-Riau Berdasarkan APBD 2020 Penyesuaian

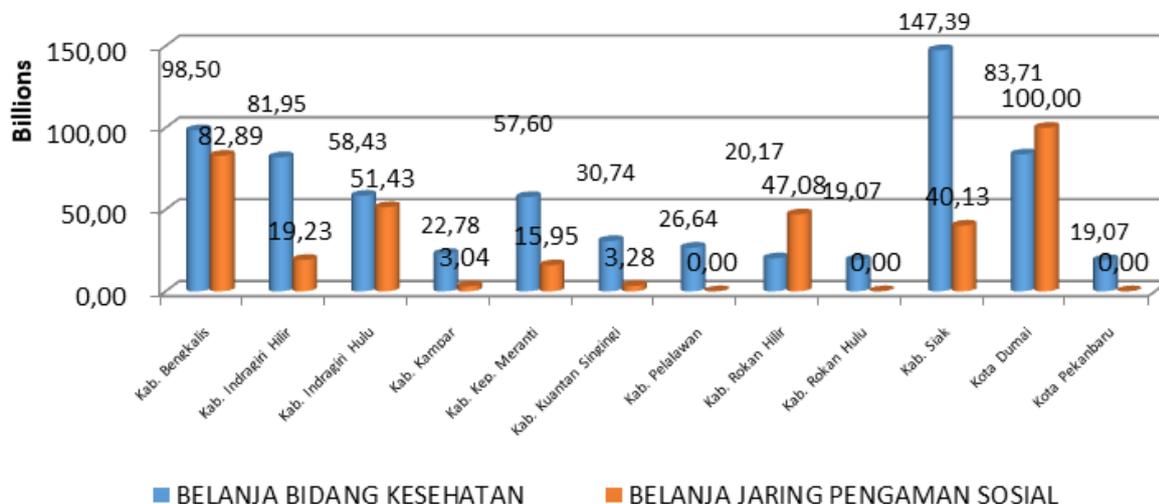


Sumber: Data APBD Penyesuaian, olahan FITRA Riau

Belanja COVID 19 KAB/KOTA Se Riau Cenderung Pada Alokasi Kesehatan. Pemerintah Daerah di 12 Kab/Kota Se- Riau. lebih cenderung mengalokasikan belanja anggaran tersebut untuk belanja bidang pelayanan kesehatan Covid-19 dari pada belanja yang diperuntukan untuk dampak ekonomi. Berdasarkan potretnya untuk daerah di 12 Kab/Kota yang besar mengalokasikan belanja bidang pelayanan kesehatan adalah Kab Siak dengan alokasi sebesar Rp. 147.38 Milyar. Sedangkan untuk belanja Jaring Pengaman Sosial dan belanja untuk dampak ekonomi lebih rendah hanya Rp. 6.66 Milyar dibandingkan dengan belanja bidang kesehatan dan sebesar Rp. 40.13 Milyar belanja untuk Jaring Pengamanan Sosial.

Sedangkan daerah yang stabil dalam belanja anggaran Penanganan Covid-19 adalah Kab. Bengkalis, jika di telusuri untuk belanja bidang kesehatannya adalah sebesar Rp. 98.49 Milyar dan untuk belanja Pengamanan Jaringan Sosial sebesar Rp. 82.88 Milyar. Sedangkan untuk belanja dampak ekonomi sebesar Rp. 24.76 Milyar. Sehingga Jika ditotalkan dari 12 Kab/Kota lainnya. Kab. Bengkalis merupakan Kabupaten peringkat tertinggi di Provinsi Riau yang mengalokasikan belanja Covid-19 sebesar Rp. 206.147 Milyar setelah Provinsi Riau pada APBD Penyesuaian dan Perubahan.

Grafik 10. Anggaran Penanganan Covid di 12 Kab/Kota se-Riau Berdasarkan APBD 2020 Penyesuaian (Belanja Jaring Pengamanan sosial dan Belanja bidang Kesehatan)

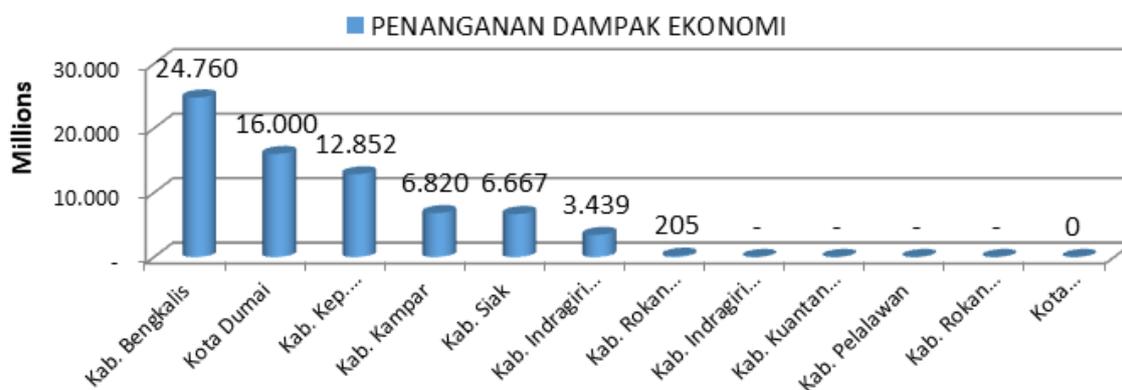


Sumber: Data APBD Penyesuaian, olahan FITRA Riau

Lima Daerah Kab/kota Tak Patuh di sektor Penanganan Dampak Ekonomi. FITRA Riau mencatat, walaupun komitmen Pemerintah Daerah sudah terbangun tetapi tidak menjadi daerah tersebut patuh kepada peraturan Pemerintah Pusat yang telah menetapkan dan mewajibkan daerah untuk merealokasikan belanja Anggaran pada tiga sektor.

Di Riau masih ditemukan daerah yang tidak patuh terhadap orientasi belanja peruntukan dan tidak mengalokasikan belanja untuk penanganan dampak ekonomi. yaitu Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kuantan singingi. Kab Rokan Hulu, Kab. Pelalawan dan Kota Pekanbaru.

Grafik 11; Sektor Belanja Penaganan dampak ekonomi 5 kab/kota Nihil Belanja.



Sumber: Data APBD Penyesuaian, olahan FITRA Riau

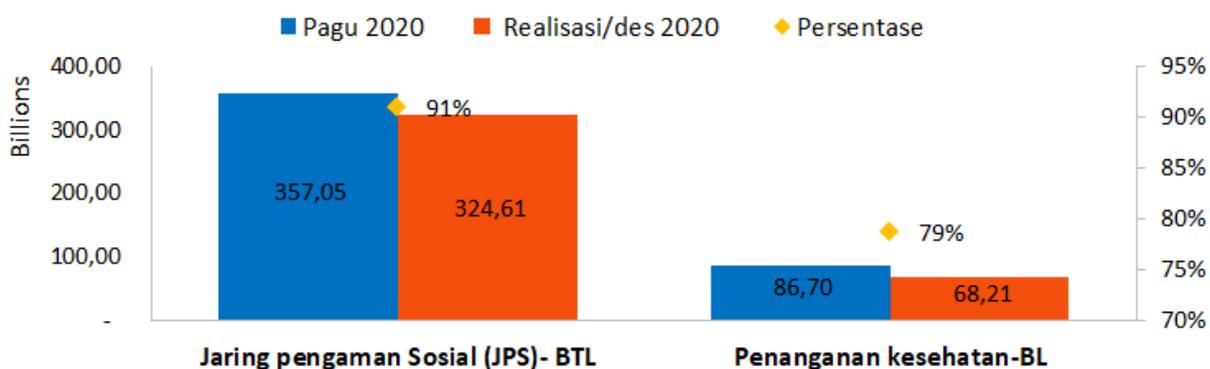
3. Potret Realisasi Anggaran Covid-19 Di Provinsi Riau (Per/Desember 2020)

Kondisi Fiskal keuangan daerah akibat dampak Covid-19 terus mengalami perubahan yang signifikan terlihat dari pendapatan yang menurun dari target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah sampai kepada pergeseran belanja program yang mengharuskan pemerintah melakukan upaya pengalihan belanja program untuk penanganan Covid-19. Artinya, pemerintah telah melakukan upaya kebijakan untuk menganulir percepatan penanganan Covid-19 terlihat dari potret belanja anggaran bahwa pemerintah daerah lebih cenderung mengalihkan proyeksi belanja penanganan Covid-19 kepada pemulihan ekonomi, dibandingkan dengan bidang kesehatan.

(Penyesuaian dan Perubahan) dengan jumlah Rp. 50.935 Milyar,

Perkembangan Realisasi Belanja Covid-19 di Provinsi Riau. Provinsi Riau jika dilihat dari potret pelaksanaan belanja anggaran sudah melakukan perencanaan belanja anggaran sebesar Rp. 443.755 Miliar akan tetapi jika dilihat dari persentasenya hanya terserap 88.52% dari catatan realisasi per 30 desember. Jika di lihat dari potret perkembangannya kenapa Pemerintah Provinsi sedikit serapan anggaran belanja penanganan Covid-19 disebabkan tidak 100% bankeu penanganan dampak Covid-19 yang terserap dan itu terlihat pada Kota Pekanbaru, Kab.Kuasing dan Kab.Bengkalis.

Grafik 12; Realisasi Anggaran Covid-19 Provinsi Riau (per/Desember 2020)



Sumber: BPKAD Prov. Riau – diolah

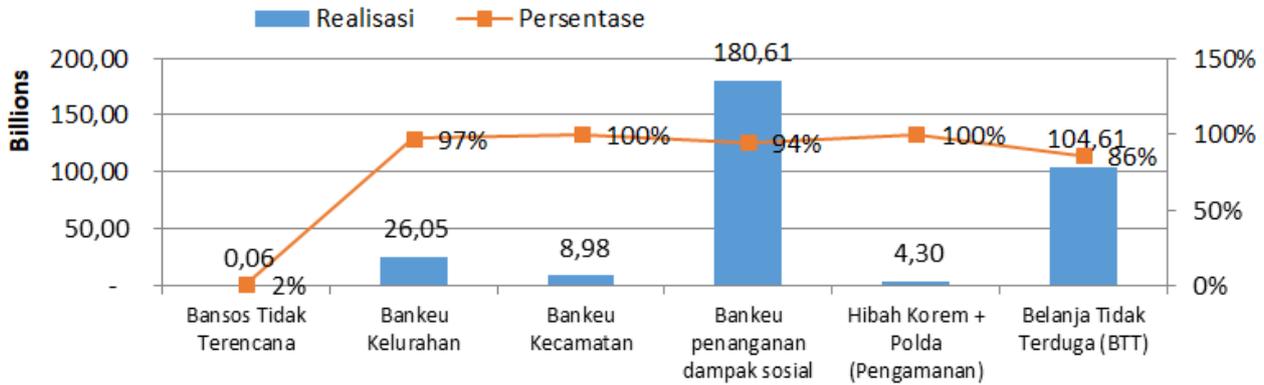
Berdasarkan realisasi Belanja penanganan Covid-19 dalam total pagu yang dianggarkan setelah mengalami 3 kali tahapan pergeseran, menjadi Rp. 443,755 Milyar dan hanya terrealisasinya sebesar Rp. 392.819 Milyar. Artinya jika dijumlahkan dalam potret realisasi tersebut bersisa belanja untuk penanganan Covid-19 di tahun belanja 2020

Selain itu juga terlihat pada Bankeu keluarahan yang diawal dianggarkan untuk bantuan tersebut sebesar Rp. 26.800 milyar dan hanya terserap Rp. 26.049 milyar artinya selisihnya sedikit. Sedangkan untuk Bansos tidak terencana dianggarkan pada belanja daerah sebesar Rp 3.900 Milyar tetapi hanya terserap Rp. 60 Juta atau 1.54%.

begitu juga dengan realisasi belanja bidang kesehatan yang diperutukan pada post bela-

nja langsung hanya terserap Rp. 324.607 M dari Belanja anggaran Rp 357.057 Milyar

Grafik 13; Potret realisasi anggaran penanganan Covid-19, berdasarkan jenis belanja pada Pemerintah Provinsi Riau



Sumber: Realisasi Per 30 Desember

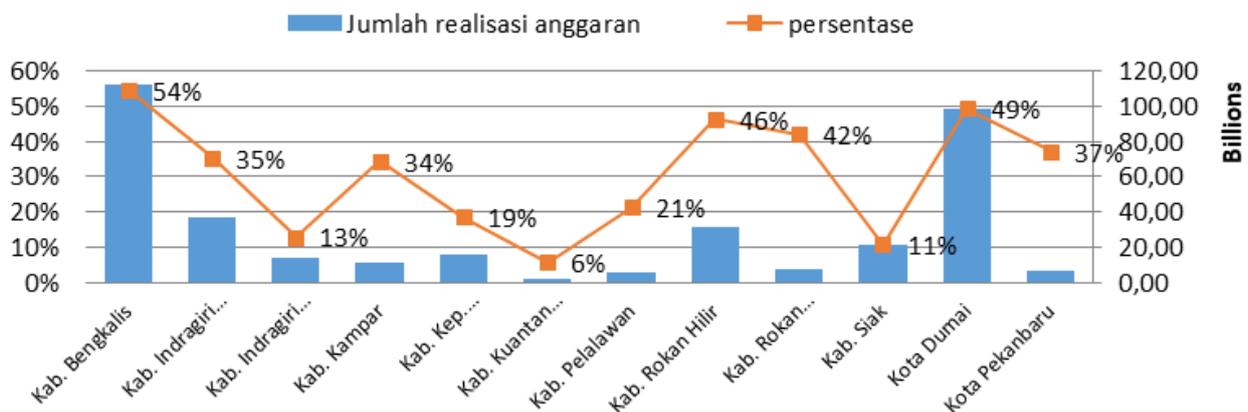
4. Perkembangan Realisasi Anggaran Covid 19 Kab/Kota se-Riau (per/Agustus 2020)

untuk Kabupaten/Kota yang rendah serapan di bawah 20% terdapat pada daerah kab.

Kuantan Singingi dengan persentase 6% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.04 milyar. Di lanjutkan Kab Siak dengan Realisasi belanja anggaran sebesar Rp. 21.3 Milyar dengan persentase 11% dan Kab. Indragihulu dengan persentase 13% dan realisasi belanjanya sebesar Rp. 14.3 Milyar se-

rta Kab. Kepulauan Meranti dengan realisasi sebesar Rp. 16.08 Milyar atau 19%. Sedangkan daerah dengan realisasi stabil adalah Kab Bengkalis dengan alokasi belanja dari tiga sektor (bidang kesehatan, jaminan sosial, dan penanganan dampak ekonomi) dengan alokasi belanjanya dalam APBD Penyesuaian sebesar Rp. 206 Milyar dengan realisasi Rp. 112 Milyar dengan persentase 54%.

Grafik 14; Realisasi Anggaran Covid 12 Kabupaten/kota di Riau (per/Agustus 2020)



Sumber: Dok.APBD-Olahan FITRA RIAu

BAGIAN IV

KOMITMEN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DAERAH

C. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENANGANAN COVID DI RIAU

1. Kinerja Keterbukaan Anggaran Covid-19

Hampir seluruh daerah di Riau memiliki website khusus dalam penanganan Covid-19, kecuali pada tiga daerah yaitu Kabupaten Meranti, Rokan Hilir dan Kuantan Singingi. Berdasarkan penelusuran website Pemerintah, tidak ditemukan satupun daerah yang mempublikasi informasi berkaitan dengan kebijakan anggaran penanganan Covid-19. Informasi yang ditemukan hanya berkaitan dengan sebaran angka Covid-19, materi sosialisasi pencegahan Covid-19, daftar Rumah Sakit rujukan dan informasi lainnya bersifat himbauan dan protokol kesehatan.

Informasi anggaran terkait Covid-19 di daerah seharusnya penting untuk dibuka ke publik dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana Covid-19. Diketahui bahwa seluruh Pemerintah Daerah se Riau telah mengalokasikan dan menggunakan anggaran yang secara khusus digunakan untuk penangan

anan Covid-19 sebagai bentuk komitmen Kepala Daerah untuk penanganan kesehatan, dampak sosial dan pemulihan ekonomi. Untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan Covid-19 seharusnya pemerintah mempublikasikan informasi agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana kesiapan Pemerintah untuk menghadapi ancaman Covid-19. Anggaran yang dialokasikan dan dilaksanakan dengan kondisi darurat rentan untuk diselewengkan.

Tidak Transparan, Bukti Pemerintah sewenang-wenang tak akuntabel Fitra Riau juga menemukan dari hasil tracking lapangan bahwa terdapat berbagai masalah terkait dengan penanganan Covid-19 di Provinsi Riau terkhusus pada Pemerintah Kota Pekanbaru, adapun temuannya terkait dengan masalah pendistribusian dan pendataan yang tidak lain disebabkan karna ketidakterbukaan informasi pemda. Berikut Catatannya :

MASALAH/TEMUAN	CATATAN PROSES	LINK WEBSITE
BLT Tidak Tepat sasaran, warga Kota lakukan somasi	Warga Kota Pekanbaru melakukan pelayangan surat somasi SK Walikota Pekanbaru Nomor 283 Tahun 2020 dan Keputusan Walikota nomor 336 Tahun 2020 tentang perpanjangan status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat Covid-19	https://www.metrotvnews.com/play/kWDCdo0D-penyaluran-bansos-dinilai-buruk-warga-pekanbaru-layangkan-somasi-ke-wali-kota

	<p>di Kota Pekanbaru, SK tersebut berisikan tentang jumlah total warga yang menerima bantuan akan tetapi fakta dilapangan bantuan diterima tidak sesuai dengan data penerima, kepada Walikota Pekanbaru terkait dengan pendistribusian Bansos yang tidak semestinya. Somasi tersebut dilakukan warga atas keluarnya edaran</p>	
<p>Alasan Administrasi BANK dana BLT dipotong Rp 50 Ribu</p>	<p>Pemerintah Provinsi Riau memberikan bantuan BLT kepada warga Kota Pekanbaru melalui Bankeu Provinsi kepada 12 Kab/Kota se-Riau. Dalam proses penyaluran dana tersebut terdapat pemotongan dengan dalih admnistrasi bank sebesar Rp. 50 Ribu yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Kota Pekanbaru</p>	<p>https://www.riauin.com/read-15455-2020-07-01-waduh-pemko-pekanbaru-ketahuansunat-dana-bansos-covid19-rp50-ribuper-kk.html</p>
<p>Puluhan RT/RW Tolak bantuamn sembako Walikota Pekanbaru</p>	<p>Masalah pendataan berujung pada aksi RT/RW yang menolak bantuan Sembako warga dari penelusuran FITRA Riau bahwa aksi penolakan tersbut diakibatkan bahwa pemkot akan menyalurkan bantuan kepada 40 ribu kepala keluarga (KK). Jumlah itu terdiri dari 15 ribu KK miskin dan 25 ribu warga terdampak covid-19 tapi hanya 15 ribu KK yang direalisasikan. Sehingga untuk meminimalisir kegaduhan maka forum RT RW di Kota Pekanbaru menolak bantuan sembako tersebut. Selain itu penyebab lainnya adalah ketidak sesuai data penerima</p>	<p>https://regional.kompas.com/read/2020/04/27/13433761/data-tak-sesuai-yang-diajukan-</p>

Sumber: dari tracking Fitra berdasarkan liputan media,Desember 2020

kondisi ini dapat diartikan bahwa, Pemerintah masih belum bisa berkomitmen dalam penanganan Covid-19 terdapat berbagai problem yang tercatat bahwa Pemerintah enggan memperbaiki kebijakan tersebut mulai dari membuka data penerima Bansos dan Hibah, anggaran serta realisasi. apabila ini terus terjadi dan tidak ada penyelesaian dan perbaikan maka tidak tutup

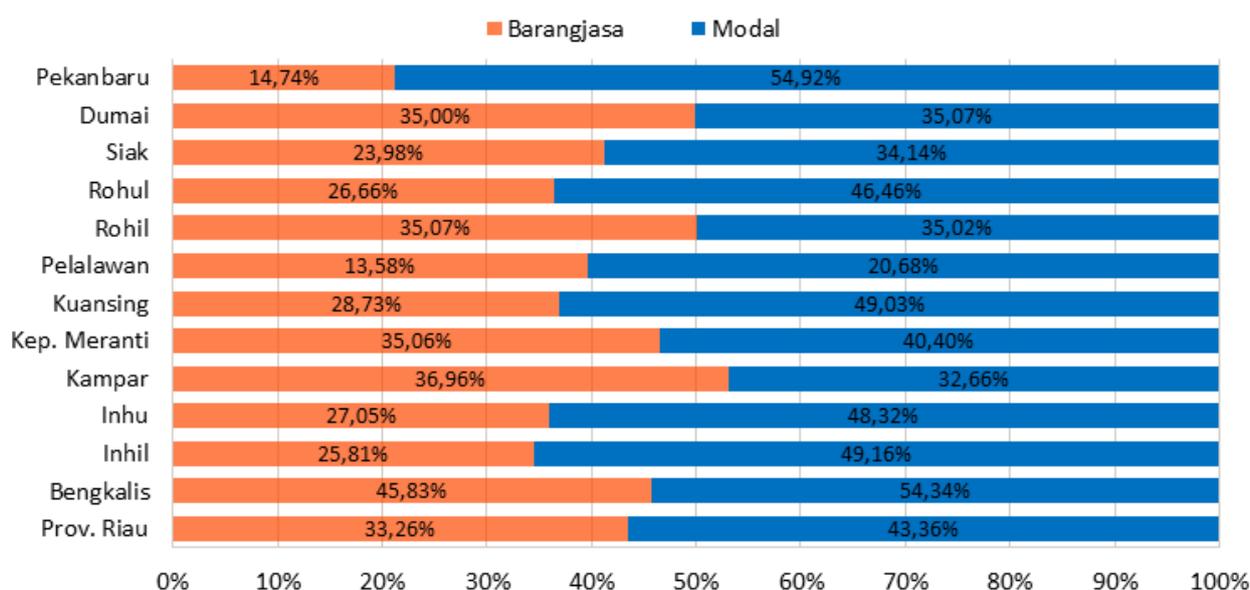
kemungkinan akan ada celah yang berujung pada perbuatan korupsi. Meskipun demikian Pemerintah Provinsi Riau sudah membuat kebijakan platform mata Bansos, Satgas Covid-19 tetapi dari penelusuran platform yang dibangun tersebut belum terbuka sepenuhnya dan public masih sulit mendapatkan akses informasi.

2. Akuntabilitas Kebijakan Anggaran Covid-19 Provinsi dan Kab/Kota

Faktanya Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi Riau maupun 12 Kabupaten/Kota di Riau belum sepenuhnya mematuhi mandate dari SKB menteri tersebut, secara rata-rata rasionalisasi belanja barang jasa hanya mencapai 29% dan belanja

modal rata-rata mencapai 42%, kecuali Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Kota Pekanbaru pada realokasi belanja modal sudah melebihi angka 50%, masing-masing mencapai 54% setelah melakukan penyesuaian APBD tahun 2020.

Grafik 15; Realokasi Belanja Barang jasa dan Belanja Modal Di Provinsi Riau dan 12 Kabupaten/Kota, Tahun 2020



Sumber; Dok. APBD, Olahan FITRA Riau

BAGIAN IV

LANGKAH MAJU PEMERINTAH DALAM KEBIJAKAN PENANGANAN COVID DI TAHUN 2021

D. DAMPAK DAN ARAH BELANJA COVID-19 DI TAHUN 2021

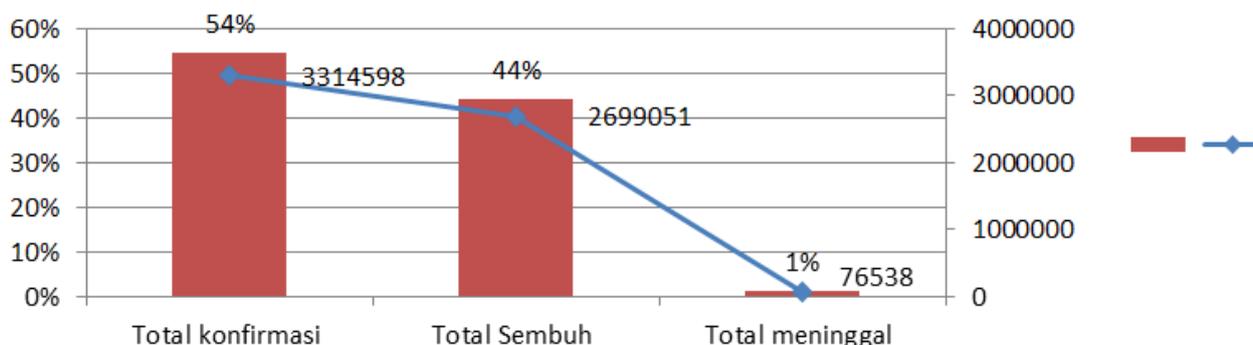
1. Dampak Anggaran Pada Penanganan Kasus

Kondisi Covid-19 yang terjadi di Indonesia khususnya di Provinsi Riau pada Tahun 2021 tidak mengalami penurunan bahkan terjadi peningkatan terus menerus per hari akan tetapi peningkatannya juga tidak begitu tinggi.

untuk prioritas alat kesehatan, penanganan kesehatan dan jasa pemeriksaan pasien.

Dari total anggaran belanja tersebut tidak berefek Pada kesembuhan pasien jika diasum-

Grafik 16. Data Konfirmasi Covid.19 Provinsi Riau



Sumber: Data Satgas Covid Riau. MARET – DESEMBER

Dari kesimpulan data dalam perkembangan kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 mengalami lonjakan tinggi dengan persentase 54% akan tetapi untuk pasien yang sembuh hanya 44% dan angka kematian cenderung sedikit dengan persentase 1%

Oleh karena itu, dari potret hasil penelusuran, Pemerintah Provinsi Riau lebih cenderung mengalokasikan belanja anggarannya kepada belanja bidang jaminan pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi dari pada belanja bidang kesehatan yang jauh lebih sedikit sebesar Rp. 86.70 M yang dipostkan

sikan adalah sedikitnya anggaran belanja kesehatan menjadi alasan kurang berdampak pada kesembuhan warga yang terkonfirmasi covid.

2. Fokus Belanja Untuk Penanganan Covid 19 Pada APBD 2021.

Provinsi Riau dalam Pendapatan Belanja Riau 2021 yang diproyeksikan sebelumnya turun, dilihat dari kondisi fiskal dimasa pandemic. Untuk jumlah pendapatan 2021 Provinsi Riau sebesar Rp. 9.032 Triliun, Belanja daerah Provinsi Riau di tahun 2021 berjumlah Rp. 9.132,- Triliun dari sumber belanja operasi-

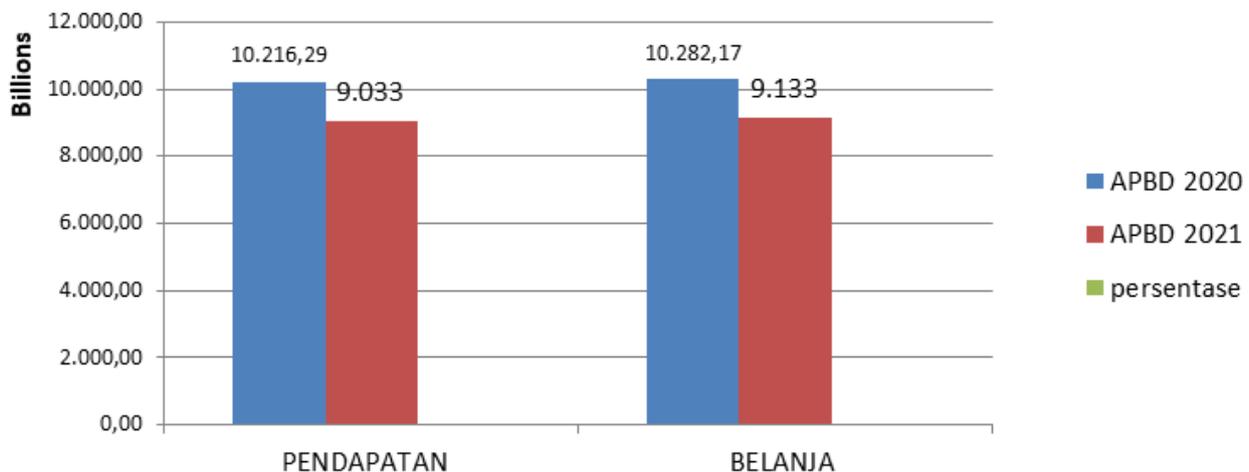
Rp. 6.293 Triliun, belanja modal Pemprov sebesar Rp. 979,27 Miliar, belanja tidak terduga Rp. 66.068,- Miliar dan belanja transfer sebesar Rp. 1,793 Triliun.

Potensi Belanja Covid-19 tahun 2021 belanja anggaran untuk penanganan Covid-19 Pada APBD 2021 Provinsi Riau, Melakukan alokasi belanja Sebesar Rp. 511.002 Miliar yang diprioritaskan untuk 5 hal yaitu Bankeu, Belanja Tidak Terduga, Kesehatan dan Belanja

Hibah dan Bansos yang dipostkan melalui belanja Dinas Sosial. Akan tetapi dari alokasi belanja tersebut FITRA Riau belum mendapat kepastian secara rincian dari masing-masing peruntukan belanja tersebut untuk apa saja

BTT dan berapa peruntukan Bankeu Per Kab/Kota yang diberikan dikarenakan sampai saat ini Pemprov belum membuka secara rinci anggaran Covid-19 walaupun dalam dokumen APBD 2021 sudah terbuka dan proaktif melalui kanal website Riau.Go.Id.

Grafik 17: Perkembangan Belanja APBD 2020 – VS 2021

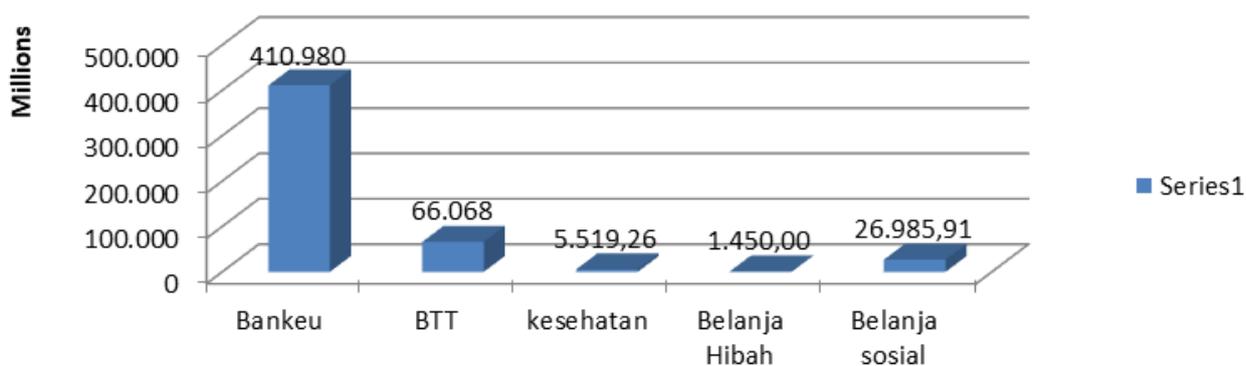


Sumber; Dok,APBD Provinsi Riau,Olahan FITRA

Untuk belanja khusus penanganan kesehatan, dalam APBD 2021 Pemprov Riau mengalokasikan belanja untuk diprioritaskan pada pengadaan obat vaksin senilai Rp 5.492 Miliar dan distribusi obat vaksin senilai Rp 27.05 Miliar.

Sementara itu untuk belanja pada penanganan kesehatan yang dulunya dipostkan pada rumah sakit daerah di tahun 2020, tetapi di APBD 2021 mengalami perubahan SOTK sehingga anggaran belanja untuk Rumah Sakit Daerah dipostkan pada belanja dinas kesehatan Provinsi

Grafik 18. Potensi Belanja Penanganan Covid-19



Data APBD 2021, diolah Fitra

BAGIAN V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan; Berdasarkan hasil analisis dalam kajian ini, dapat di tarik beberapa kesimpulan terkait implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di daerah, diantaranya;

- **Kondisi Keuangan** berdampak buruk pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama hampir satu tahun, berdampak buruk terhadap kondisi keuangan daerah, semua daerah di Provinsi Riau terjadi penurunan pendapatan. Penyesuaian target pendapatan daerah tahun 2020 di Provinsi Riau dan 12 Kabupaten/Kota, terjadi penurunan cukup signifikan dengan rata-rata turun sebesar 14%. Provinsi Riau terjadi penurunan target pendapatan mencapai 17,58%. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan angka tertinggi terjadi penurunan yaitu Kabupaten Bengkalis mencapai 30,69%. Kondisi ini akan berdampak terhadap pembiayaan-pembiayaan program prioritas daerah, seperti pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan kinerja penurunan kemiskinan di daerah. Selain itu, untuk pemenuhan kebutuhan anggaran penanganan Covid-19, Pemerintah Daerah harus melakukan rasionalisasi belanja terutama pada tiga sektor yaitu belanja pegawai, barang jasa dan modal. Secara khusus pula mandat rasionalisasi belanja barangjasa dan modal minimal sebesar 35%. Secara umum keseluruhan belanja daerah di Riau terjadi penurunan, pemerintah Provinsi Riau terjadi penurunan belanja sebesar 22% dari total belanja sebelumnya, sedangkan Kabupaten/Kota terdapat penurunan antara 30% - 6%, daerah tertinggi terjadi penurunan adalah Kabupaten Bengkalis dan terendah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
- **Serapan Anggaran** Rendah Fakta lain menunjukkan bahwa serapan anggaran penanganan Covid-19 di daerah masih sangat minim dan cenderung lambat, disisi lain dalam kebutuhan penanganan Covid-19 seharusnya dapat dipercepat, seperti menyangkut kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak. Serapan anggaran pada Pemerintah Provinsi Riau per/Desember 2020 mampu terserap mencapai 89% atau Rp. 392,8 Milyar dari total alokasi anggaran Covid-19 sebesar Rp. 443,7 Milyar. Sedangkan serapan anggaran di 12 Kabupaten/Kota di Riau sampai bulan Agustus 2020, rata-rata serapan dibawah angka 50%, kecuali Kabupaten Bengkalis sudah mencapai angka 54% lebih. Selain dampak kesehatan, penanganan dampak sosial akibat Covid-19 sudah menjadi agenda strategis Pemerintah Daerah, seperti pemberian bantuan sosial berupa sembako dan uang tunai. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, seperti serapan anggaran rendah, penyaluran cenderung lambat, dan pendataan yang tidak tepat sasaran. Faktanya masih banyak masyarakat yang terdampak akibat Covid-19 justru tidak masuk dalam data penerima bantuan dikarenakan data penerima hanya mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS);

- **Transparansi dan Akuntabilitas** Menjadi Tumpuan Masalah Persoalan transparansi dan akuntabilitas tata kelola anggaran sampai saat ini masih menjadi permasalahan tersendiri, berbagai kanal informasi bahkan website khusus covid-19 pada masing-masing daerah tidak ditemukan adanya ketersediaan informasi anggaran terkait penanganan Covid-19. Kondisi ini akan mempersulit pemerintah itu sendiri, sehingga kecurigaan public dalam penggunaan anggaran semakin besar, apalagi alokasi anggaran penanganan yang cukup besar namun belum mampu mengakomodir akan kebutuhan penanganan Covid-19, baik untuk kebutuhan kesehatan maupun penyediaan bantuan sosial.
- **Realokasi** Belum Memenuhi Ketentuan Perundang-Undangan Realokasi anggaran penanganan Covid-19 di daerah sepenuhnya belum mematuhi ketentuan perundang-undangan, seperti kewajiban pemerintah daerah harus merealokasikan belanja barang jasa dan modal minimal 35%, dalam kajian ini ditemukan bahwa belum semua daerah di Riau dapat memenuhi ketentuan tersebut, sehingga akan berkonsekuensi pada penundaan penyaluran DAU pada tahun berikutnya. Dengan demikian, secara otomatis akan berdampak akan kekuatan fiskal daerah ke depannya;

2. Rekomendasi; melalui kajian ini, beberapa point yang dapat direkomendasikan adalah, sebagai berikut;

- Kebijakan dan anggaran penanganan Covid-19 harus menjadi program prioritas daerah, disamping akan ketidakpastian kondisi pandemi berakhir, pemerintah daerah dapat memperhitungkan secara jelas dan terperinci terkait kebutuhan penanganan Covid-19, agar tidak terjadi perubahan anggaran yang berulang-ulang dan menyisakan Silpa anggaran yang besar, sehingga akan mengganggu program prioritas daerah lainnya;
- Pemerintah Daerah harus membuka kanal khusus terkait informasi anggaran Covid-19, sampai saat ini publik sangat terbatas dapat mengakses informasi tersebut sehingga adanya kecurigaan terhadap penyalahgunaan dalam penggunaan anggaran terkait penanganan Covid-19;
- Potensi anggaran untuk penanganan covid-19 pada tahun 2021 diproyeksikan naik dari tahun sebelumnya yaitu mencapai Rp. 511 Milyar, terdiri dari Belanja Kesehatan, Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial, Hibah dan Bantuan Tidak Terduga. Dengan demikian, partisipasi public mutlak harus dilibatkan, mengingat pada pelaksanaan anggaran tahun 2020 menyisakan banyak persoalan, khususnya terkait penyediaan Jaring Pengaman Sosial.

- Pendataan masyarakat yang terdampak dan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) harus dilakukan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, agar tidak terulang kesalahan data dalam penyaluran bantuan sosial dan tidak berkonsekuensi hukum.
- Dalam pelaksanaannya, selain untuk pemenuhan kebutuhan anggaran, pemerintah juga harus secara cepat dapat menyalurkan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang terdampak, agar tidak menimbulkan persoalan lainnya, sekaligus dapat menghentikan pergerakan masyarakat dalam rangka meminimalisir penularan virus itu sendiri.

Social Media



@FitraProvinsiRiau



@Fitrariau



Fitra Provinsi Riau



YouTube Fitra Riau

Kontak

sekretariat.fitrariau@gmail.com - Email

www.fitrariau.org - Website

